

ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI MASYARAKAT GORONG-GORONG KELURAHAN KEBUN SIRIH DI KABUPATEN MIMIKA

Karina Sukardi

Email: karindiba@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the multidimensional poverty of the people of Gorong-rong Kebun Sirih Village in Mimika Regency. Data collection techniques used to obtain data in this study are observation techniques, interviews, documentation, questionnaires. The analysis used in this study is an analysis with the Multidimensional Poverty Index (IKM). The results of this study show that the conditions experienced by the people of Gorong-rong such as lighting sources still use petromak, lamps or other, cooking fuel still uses firewood and kerosene, the roof of the house still uses zinc that is not worth using, the floor of the house still uses low quality boards and the walls of the house still use zinc and unfit boards because the community lacks access to basic infrastructure and the poverty experienced by the sewer community has a close relationship with psychological dimensions such as incompetence, powerlessness to voice, dependence and shame.

Keywords: Welfare, Poverty, Multidimensional Poverty

PENDAHULUAN

Salah satu wilayah yang tingkat kemiskinannya paling tinggi di Indonesia adalah Provinsi Papua. Menurut laporan BPS Statistik Indonesia Tahun 2019 Periode September 2018, Provinsi Papua menempati urutan pertama dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 36,65 persen dari 877,44 ribu jiwa penduduk miskin Papua. Sedangkan menurut Provinsi Papua Dalam Angka tahun 2019, Presentase tingkat kemiskinan di tahun 2018 sebesar

27,74. Dan menurut Laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia Tahun 2015-2018, Papua menjadi Wilayah dengan Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM) tertinggi di tahun 2018 sebesar 60,6 persen.

Aidha, dkk (2020), Pada periode 2015-2018 kesenjangan kemiskinan multidimensi antara kota dan desa berkisar antara 10,71-17,23 persen, namun kemiskinan di desa sebenarnya telah mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 22,22 persen

pada 2015 menjadi 14,03 persen pada 2018, sedangkan kemiskinan di kota penurunannya dapat dikatakan rendah yaitu dari 4,99 persen pada 2015 menjadi 3,32 persen pada 2018. Provinsi termiskin untuk wilayah perkotaan tercatat Papua 21,74 persen pada tahun 2018. Sementara itu, provinsi dengan AKM tertinggi untuk wilayah perdesaan adalah Papua 75,42 persen.

Untuk tingkat kemiskinan Provinsi Papua menurut Laporan Papua Dalam Angka 2019, dari 29 Kabupaten/kota yang tersebar di

wilayah papua, Kabupaten Mimika menempati urutan kelima dengan tingkat kemiskinan terendah di tahun 2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, penduduk miskin kabupaten mimika tahun 2018 sebesar 14,55%, sedangkan angka kemiskinan multidimensi kabupataen/kota di Provinsi Papua di tahun yang sama untuk Kabupaten Mimika sebesar 25,11%.

Berikut ini disajikan data penduduk miskin Kabupaten Mimika tahun 2014-2018.

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mimika Tahun 2014-2020

Tahun	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase
2014	32,22	16,11
2015	32,85	16,20
2016	30,12	14,72
2017	31,15	14,89
2018	31,18	14,55
2019	31,79	14,54
2020	31,75	14,26

Sumber: Mimika Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa presentase kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mimika dari tahun ke tahun secara keseluruhan menurun. Penurun kemiskinan terjadi pada tahun 2015 ke 2016 sebesar 1,48% dan tahun 2017 ke 2020 sebesar 0,63%. Sedangkan peningkatan presentase kemiskinan terjadi di tahun 2014 ke 2015 sebesar

0,09% dan tahun 2016 ke 2017 sebesar 0,17%.

Berdasarkan laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia, Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM) Kabupaten Mimika dari tahun 2012 sebesar 62,2 persen dan tahun 2018 sebesar 25,11 persen mengalami penurunan sebesar 37,09 persen. Sedangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)

Kabupaten Mimika dari tahun 2015 sebesar 0,139 dan tahun 2018 sebesar 0,096 persen mengalami penurunan sebesar 0,043 persen.

Salah satu wilayah di Kabupaten Mimika yang ingin diketahui tingkat kemiskinan multidimensinya adalah wilayah Gorong-gorong, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru. Kebun Sirih merupakan wilayah

pemekaran dari Kelurahan Koperapoka dan Kwamki Baru yang dimekarkan pada tahun 2013 namun penetapannya dilakukan pada tahun 2014.

Wilayah Gorong-gorong terdapat 5 RT yang terdiri dari RT 14, RT 15, RT 16, RT 18 dan RT 19. Berikut ini disajikan data wilayah Gorong-gorong.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Gorong-gorong, Kelurahan Kebun Sirih Tahun 2020

No	RT	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa		Totat
			Laki-laki	Perempuan	
1	RT 14	190	421	400	821
2	RT 15	210	412	411	823
3	RT 16	120	400	451	851
4	RT 18	119	450	455	905
5	RT 19	215	400	445	845
Jumlah		854	2.083	2.162	4.245

Sumber: Kelurahan Kebun Sirih, 2020

berdasarkan tabel diatas, jumlah kepala keluarga masyarakat Gorong-gorong berjumlah 854 kepala keluarga dengan total jumlah penduduk sebanyak 4.245 jiwa yang terdiri 2.083 jiwa penduduk laki-laki dan 2.162 jiwa penduduk perempuan.

Dari jumlah penduduk tersebut, sebagian masyarakat Gorong-gorong ada yang tidak sekolah dan ada juga yang sudah selesai pendidikan dan bahkan bekerja pada instansi pemerintahan di Kabupaten Mimika. Pekerjaan yang saat ini

banyak dilakukan oleh masyarakat Gorong-gorong adalah bertani, berkebun dan beternak.

Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan masyarakat Gorong-gorong sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki tingkat pendidikan yang baik. Hal ini menyebabkan masyarakat Gorong-gorong hanya bertani, berkebun, beternak dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut kemudian dijual dipasar Gorong-

gorong untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Namun bukan hanya pekerjaan, pendidikan atau pendapatan saja yang menjadi masalah bagi masyarakat Gorong-gorong. Kondisi rumah yang kurang layak, kepemilikan aset yang terbatas, air bersih yang terbatas, sanitasi yang terbatas, kumuhnya pemukiman penduduk serta infrastruktur yang belum tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten Mimika seperti halnya Jalan yang rusak dan belum teraspal, pasar yang kurang layak dimana menjadi salah satu tempat bagi masyarakat Gorong-gorong untuk menjual hasil bertani, berkebun dan beternak untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta sering terjadinya kekacauan di wilayah Gorong-gorong.

Masalah kemiskinan tersebut sifatnya kompleks dan multidimensi yang berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan maupun standar hidup bagi masyarakat Gorong-gorong. Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Mimika kesulitan dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya penyebab kemiskinan yang terjadi saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya

pembangunan ekonomi dalam suatu Negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur, yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2010: 10)

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai “suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*Income per-kapita*) dalam jangka panjang” (Subandi, 2011: 9)

Pembangunan ekonomi menurut pendapat Meier yaitu “*suatu proses di mana pendapatan perkapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang*” (Subandi, 2010: 9)

Menurut Subandi, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran, yang ditunjukkan peningkatan pendapatan perkapita, yang ditunjukkan peningkatan

pendapatan perkapita dalam jangka panjang (2011: 8)

Jadi, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara factor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Dengan demikian pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan tersebut merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang digambarkan dengan pertambahan GDP/GNP (Subandi, 2022: 14)

Pertumbuhan Ekonomi

Kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2010: 9)

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak (Subandi, 2011: 15)

Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan menurut ekonomi secara umum oleh Albert dan Hahnel diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. *Neoclassical welfare theory* merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality*. Selain prinsip *Pareto Optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. *New contractarian approach*, prinsip ini adalah bahwa individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya (Robby, 2019)

Fahrudin menyatakan kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Prabawa, kesejahteraan sering diartikan

secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut Rambe, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rosni, 2017: 57).

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;

- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain (Rosni, 2017: 57-58)

Keluarga Sejahtera

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 (Robby, 2019), Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan

Kemiskinan

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat

bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Bachtiar Chamsyah, kemiskinan merupakan keadaan tertutup, yaitu tertutup dari segala bentuk pemenuhan kebutuhan diri yang bersifat fisik atau non fisik. Menurut suparlan, kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta benda dan benda berharga yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau serba kekurangan modal, uang, pengetahuan, kekuatan sosial, fisik, hukum, maupun akses ke fasilitas pelayanan umum, kesempatan kerja, dan berusaha.

Menurut Friedman kemiskinan adalah ketidaksetaraan kesempatan untuk menformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses ke pendidikan dan pekerjaan (Machmud, 2016: 280-282)

Macam-macam Kemiskinan

Menurut Arsyad (Baniadi, 2018: 19-20), kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan yang meliputi konsumsi pribadi dan kebutuhan pelayanan sosial. Kemiskinan kedua yaitu kemiskinan relatif, dimana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya.

Menurut Mochtar Mas'ood (Baniadi, 2018: 20), kemiskinan jika ditinjau dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah timbul akibat kelangkaan SDA. Kondisi tanah yang tandus, tidak tersedianya irigasi, dan langkanya prasarana lain merupakan penyebab utama kemiskinan. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena munculnya kelembagaan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi secara merata.

Menurut Subandi, kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi kemiskinan alami (kultural) dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan alami berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, tingkat produktivitas, dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan masalah yang timbul karena strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sachs membagi kemiskinan menjadi 3 kategori yaitu kemiskinan ekstrim (absolut), kemiskinan moderat, dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrim adalah kondisi dimana rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan hidup. Kondisi rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrem ditandai dengan kelaparan kronis, tidak mampu mengakses layanan kesehatan, tidak memiliki sumber air dan sanitasi yang baik, tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, dan mungkin kekurangan perlindungan dasar. Sedangkan kemiskinan moderat merujuk kondisi dimana rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar saja. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan pendapatan rumah tangga yang beradadi bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Tambunan (Azwar dan Achmat, 2016: 7), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat

investasi, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-lain.

Menurut World Bank, penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Menurut Chriswardani, selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:

a. *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar

masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.

- b. *Human assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets*: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.

Kemiskinan Moneter

Penduduk miskin moneter adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah standar yang ditetapkan (Baniadi, 2018: 59)

Menurut Grosh (Nuryitmawan, 2016: 35-36) menjelaskan pendekatan moneter merupakan yang paling sering digunakan untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan ini

mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi karena pendapatan yang dimiliki individu dibawah garis kemiskinan. Grosh berpendapat bahwa daya tarik dari pendekatan moneter ini karena kompatibel dengan asumsi maksimilisasi utilitas. Daya tarik selanjutnya adalah karena menggunakan asumsi maksimilisasi utilitas maka pendekatan yang cocok adalah mikroekonomi.

Penggunaan pendekatan moneter untuk mengukur kemiskinan memang dibenarkan dalam dua cara yang berbeda:

- a. Pertama, pendekatan hak minimum dimana pendapatan utama dianggap sebagai hak dasar tanpa mengacu pada utilitas melainkan untuk mencapai kebebasan pilihan tersebut (Atkinson dan Van Parijs).
- b. Kedua, penggunaan indikator moneter sering dianggap bukan karena utilitas yang timbul karena pengukuran moneter, melainkan karena diasumsikan bisa selalu mewakili secara tepat pada aspek kesejahteraan dan kemiskinan. Pada implementasinya pendekatan moneter dibagi menjadi dua konsep utama yaitu yang disebut kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Schiller).

Kemiskinan Multidimensi

Narayan et al. (Aida, dkk., 2020: 11-12), memberikan pandangan mengenai kemiskinan yang bersifat multidimensi dan

saling berhubungan antara satu dimensi dengan lainnya. Penyebab kemiskinan multidimensi menurut Narayan et al. adalah: (1) orang miskin kurang untuk akses infrastruktur dasar, jalan pedesaan, transportasi, dan air bersih; (2) kemiskinan mempunyai hubungan yang erat dalam dimensi psikologis, seperti ketidak berdayaan, ketidak mampuan untuk menyuarakan, ketergantungan, rasa malu, dan penghinaan; (3) orang miskin melihat bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk keluar dari kemiskinan, tetapi sayangnya selama ini kesehatan dianggap sebagai faktor paling penting dalam mendefinisikan kemiskinan, sehingga berakibat bahwa pengobatan lebih banyak dalam bentuk seperti peningkatan gizi dan sebagainya, yang bersifat pengobatan dan bukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kemiskinan. Terakhir, dari kesimpulan kemiskinan yang bersifat multidimensi, ia menganggap bahwa orang miskin sangat jarang berbicara mengenai kemiskinan, tetapi fokus pada persoalan bagaimana mengelola aset yang ada, yaitu fisik, manusia, sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, masalah gender berperan cukup penting dalam memberikan perspektif dimensi.

Nuryitmawan (2016: 35), Kemiskinan multidimensional melihat bahwa faktor yang menyebabkan orang menjadi miskin terdiri dari lingkup yang lebih luas tidak hanya dilihat dari perspektif pengeluaran konsumsi

atau pendapatan perseorangan. Philip dan Ryhan mengemukakan pandangan multidimensi tersebut di istilahkan dengan *non-welfare approach*. Pendekatan kemiskinan *non-welfare approach* menekankan pada aspek keberfungsian seseorang untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat dalam masyarakat.

Multidimensional poverty memiliki sejumlah indikator dalam perhitungan kemiskinan. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Pada dimensi pendidikan yang diukur melalui lama sekolah (*years of schooling*) dan akses terhadap pendidikan (*attendance of school*) oleh setiap individu. Dimensi kesehatan yang dititik beratkan untuk diukur adalah dengan menggunakan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak (Alkire). Konsep utamanya, indikator ini dalam kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Sedangkan dimensi ketiga yaitu standar hidup mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat.

Aida, dkk (2020: 19-21), dimensi dan indikator dalam indeks kemiskinan multidimensi indonesia adalah

a. Dimensi kesehatan

a) Sanitasi

Seseorang dikatakan terdeprivasi dalam indikator sanitasi jika tidak memiliki fasilitas buang air besar baik umum, bersama, atau pribadi

- dan jenis klosetnya bukan leher angsa.
- b) Air minum
Seseorang dikatakan terdeprivasi dalam indikator air minum jika menggunakan atau mengkonsumsi air bersih yang bukan berasal dari ledeng meteran dan ledeng eceran. Seseorang dapat pula terdeprivasi apabila tidak menggunakan air minum dari pompa, sumur terlindung/ mata air terlindung yang berjarak < 10 meter dari septic tank.
- c) Gizi balita
Balita (bayi dibawah lima tahun) dikatakan terdeprivasi apabila asupan gizinya kurang dari ambang batas yang dibutuhkan.
- b. Dimensi pendidikan
- a) Pendidikan anak usia dini (PAUD)
Individu (anak-anak) dikatakan terdeprivasi apabila mereka yang sedang berusia 3–6 tahun tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan prasekolah, seperti PAUD, pos setara PAUD lainnya, Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang setara, kelompok bermain, dan jenis pendidikan prasekolah lainnya.
- b) Keberlanjutan sekolah
Individu (anak-anak) dikatakan terdeprivasi apabila mereka yang sedang berada pada usia sekolah dasar dan menengah yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah lanjut tingkat atas, seperti SMA (Sekolah Menengah Atas)/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)/MA (Madrasah Aliyah) atau sederajat.
- c. Dimensi standar hidup
- a) Sumber penerangan
Seseorang dikatakan terdeprivasi apabila menggunakan listrik untuk penerangan yang bukan berasal dari PLN, seperti petromaks/aladin, pelita/senter/obor, atau sumber penerangan lainnya.
- b) Bahan bakar memasak
Seseorang dikatakan terdeprivasi apabila menggunakan bahan bakar untuk memasak yang menggunakan listrik dan gas sebagai bahan bakar untuk memasak, seperti minyak tanah, arang, breket, dan kayu bakar.
- c) Kondisi atap, lantai dan dinding
Seseorang dikatakan terdeprivasi apabila secara keseluruhan kondisi atap lantai dan dindingnya tidak layak. Seseorang yang terdeprivasi dalam indikator ini setidaknya memiliki kondisi yang tidak layak dua dari tiga sub-indikator (atap, lantai, dan dinding).
- (a) Atap
Suatu atap rumah dikatakan tidak layak adalah atap yang terbuat selain dari beton, genteng, seng, dan

- asbes, seperti bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun daunan/rumbia dan lainnya.
- (b) Lantai
Suatu lantai rumah dikatakan tidak layak jika lantai berbahan selain dari marmer, keramik, granit, tegel, teraso, semen, dan kayu, seperti dari bambu, kayu/papan berkualitas rendah, tanah dan bahan lainnya.
- (c) Dinding
Suatu dinding rumah dikatakan tidak layak jika lantai berbahan selain dari tembok dan kayu, seperti anyaman bambu, batang kayu, bambu dan bahan lainnya.

Indeks Kemiskinan Multidimensi

Ada 3 dimensi Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Namun pada penelitian ini membahas tentang indeks kemiskinan multidimensi pada standar hidup terutama masyarakat gorong-gorong di kabupaten mimika.

Menurut Aidha, dkk (2020: 21-24), Penghitungan IKM Indonesia merujuk pada metode Alkire dan Foster. Metodologi ini digunakan sebagai basis pengukuran IKM Global yang dikembangkan pada 2010 oleh OPHI University of Oxford dan United Nations Development Programme (UNDP) dimana angka

dan analisisnya diperbarui setiap tahun. Penghitungan IKM Indonesia mengadopsi tiga dimensi pengukuran, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup sesuai metodologi AF, namun memodifikasi beberapa indikator agar lebih relevan dengan konteks Indonesia.

Metode Alkire-Foster menjumlahkan deprivasi-deprivasi yang dialami oleh setiap orang di dalam skor deprivasi tertimbang yang mana selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang masuk kedalam kategori miskin multidimensi. Penghitungan IKM terdiri dari tiga aspek penting, yaitu IKM itu sendiri, angka kemiskinan multidimensi (H), dan intensitas kemiskinan multidimensi (A). Penjabaran setiap aspek tersebut adalah sebagai berikut:

$$IKM = H \times A$$

Dimana:

H (angka kemiskinan multidimensi) adalah proporsi jumlah penduduk miskin multidimensi terhadap total penduduk.

A (intensitas kemiskinan multidimensi) adalah proporsi rata-rata indikator tertimbang dimana orang miskin terdeprivasi.

IKM adalah hasil dari angka kemiskinan multidimensi (H) dikali intensitas kemiskinan multidimensi (A).

Nilai indeks kemiskinan multidimensi akan dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$c_i = w_1 I_1 + w_2 I_2 + \dots w_d I_d$$

Dimana:

$I_i = 1$ jika seseorang terdeprivasi dalam indikator i dan $I_i = 0$ jika

tidak. w_i adalah bobot dari indikator i dengan $\sum_{i=1}^n w_i = 1$. Seseorang dikatakan miskin ketika total rata-rata penilaian lebih besar dari $1/3$.

Kemiskinan multidimensi *headcount* atau jumlah penduduk miskin akan memberikan gambaran siapa yang mengalami kemiskinan multidimensi. Setidaknya dalam hal ini, tiap individu akan diketahui kemiskinan apa saja yang mereka alami dimana q adalah jumlah individu yang dikategorikan miskin secara multidimensional dan n adalah total populasi penduduk. Secara simbolis, penghitungan kemiskinan multidimensi *headcount* dapat ditulis sebagai berikut:

$$H = \frac{q}{n}$$

Selanjutnya, intensitas kemiskinan multidimensi atau proporsi rata-rata indikator tertimbang dimana orang miskin terdeprivasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n c_i(k)}{q}$$

Dimana:

k didefinisikan sebagai jumlah deprivasi seseorang yang harus dialami agar dapat dikategorikan sebagai miskin, dan $c_i(k)$ adalah skor sensor deprivasi.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang

menggambarkan keadaan objek atau subjek yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.

Tujuan penggunaan metode deskriptif adalah untuk mengetahui dan mengukur kemiskinan multidimensi masyarakat Gorong-gorong Kelurahan Kebun Sirih Di Kabupaten Mimika

Daerah dan Objek Penelitian

Daerah penelitian ini adalah Gorong-gorong Kelurahan Kebun Sirih, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kemiskinan multidimensi.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian terdiri atas 3, yaitu:.

a) Populasi Responden Penelitian, adalah seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta memberikan respon (jawaban) terhadap pernyataan-pernyataan (langsung/tidak langsung), lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti. Adapun populasi responden penelitian ini adalah masyarakat Gorong-gorong.

b) Populasi Objek Penelitian adalah sifat keadaan (*attributes*) dari suatu benda, orang atau keadaan yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun populasi objek penelitian ini

adalah kemiskinan multidimensi.

serta dokumen atau buku referensi terkait

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi dengan jumlah 100. Adapun sampel pada penelitian ini diambil dari populasi responden penelitian dengan jumlah sampel 100.

Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif.

a) Data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa laporan-laporan atau dokumen tertulis atau sumber pustaka lainnya

b) Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dapat dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau dalam bentuk angka. Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data kemiskinan Kabupaten Mimika Tahun 2014-2020.

b. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana setiap data dalam penelitian diambil sesuai kebutuhan si peneliti. Adapun sumber data penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, gambaran keadaan masyarakat gorong-gorong

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.

a. Observasi adalah teknik yang digunakan dengan cara mengamati secara langsung suatu peristiwa atau fenomena untuk mendapatkan informasi

b. Wawancara adalah proses memperoleh data atau keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan panduan wawancara antara pewawancara dan responden.

c. Dokumentansi adalah cara peneliti mempelajari dan mencatat dokumen atau arsip yang tertulis yang berkaitan dengan penelitian pada suatu peristiwa tertentu.

d. Kuesioner adalah teknik mengumpulkan informasi dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik secara langsung ataupun tidak langsung sesuai kebutuhan penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan metode Alkire-Foster. Metode Alkire-Foster menjumlahkan deprivasi-deprivasi yang dialami oleh setiap orang di dalam skor deprivasi tertimbang yang mana selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi

orang-orang yang masuk kedalam kategori miskin multidimensi

Rumus:

$$IKM = H \times A$$

Keterangan:

H (angka kemiskinan multidimensi) adalah proporsi jumlah penduduk miskin multidimensi terhadap total penduduk.

A (intensitas kemiskinan multidimensi) adalah proporsi rata-rata indikator tertimbang dimana orang miskin terdeprivasi.

IKM adalah hasil dari angka kemiskinan multidimensi (H) dikali intensitas kemiskinan multidimensi (A).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mencari kemiskinan multidimensi masyarakat Gorong-gorong di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Indikator Frekuensi Kemiskinan Multidimensi Masyarakat Gorong-gorong di Kabupaten Mimika

Indikator	Ya		Tidak		Total
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	
Sumber penerangan menggunakan petromak, pelita atau lainnya.	3	3%	97	97%	100
Bahan bakar memasak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah.	100	100%	0	0%	100
Atap rumah menggunakan seng yang tidak layak pakai, Lantai rumah menggunakan papan yang kualitas rendah serta dinding rumah menggunakan seng dan papan yang tidak layak.	12	12%	88	88%	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari tabel 5.1, diketahui bahwa:

- Indikator sumber penerangan menggunakan petromak, pelita atau lainnya dengan jawaban **Ya** sebanyak 3 frekuensi dengan presentase 3%, sedangkan jawaban **Tidak** sebanyak 97 frekuensi dengan presentase 97%.

- Bahan bakar memasak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah dengan jawaban **Ya** sebanyak 100 dengan presentase 100% sedangkan jawaban **Tidak** 0 frekuensi dengan presentase 0%.

- Atap rumah menggunakan seng yang tidak layak pakai, Lantai rumah menggunakan papan yang kualitas rendah serta

dinding rumah menggunakan seng dan papan yang tidak layak dengan jawaban **Ya** sebanyak 12 frekuensi dengan presentase 12% sedangkan jawaban **Tidak** sebanyak 88 frekuensi dengan presentasi 88%

Dari penjelasan diatas dapat dihitung kemiskinan multidimensi masyarakat Gorong-gorong di Kabupaten Mimika sebagai berikut:

- a. Kemiskinan multidimensi *headcount*

$$H = \frac{q}{n} = \frac{2}{100} = 0,02 \times 100 = 2\%$$

Jadi, kemiskinan multidimensi *headcount* yang dialami masyarakat Gorong-gorong Kabupaten Mimika dari 100 responden adalah 2 responden dengan nilai sebesar 0,02 atau 2% yang artinya bahwa berdasarkan jumlah penduduk Gorong-gorong, 2% merupakan kategori penduduk miskin.

- b. Intensitas kemiskinan multidimensi

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n c_i(k)}{q} = \frac{0,666}{2} = 0,333 \times 100 = 33,3\%$$

Jadi, intensitas kemiskinan multidimensi yang dialami masyarakat Gorong-gorong sebesar 0,333 atau 33,3%, yang artinya proporsi rata-rata masyarakat indikator tertimbang, dihitung orang

miskin terdeprivasi sebesar 33,3%.

- c. Indeks kemiskinan multidimensi

$$\begin{aligned} IKM &= H \times A \\ &= 0,02 \times 0,0333 \\ &= 0,00666 \times 100 = 0,666\% \end{aligned}$$

Jadi, indeks kemiskinan multidimensi yang dialami masyarakat Gorong-gorong Kabupaten Mimika sebesar 0,00666 atau 0,666%, yang artinya masyarakat Gorong-gorong terdeprivasi dalam kategori sebagai masyarakat miskin multidimensi pada dimensi standar hidup.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa indeks kemiskinan multidimensi masyarakat gorong-gorong di kabupaten mimika sebesar 0,00666 atau 0,666%. Dari 100 responden yang diteliti, yang tergolong dalam kemiskinan multidimensi hanya 2 responden. Hal ini sejalan dengan teori Nuryitmawan (2016: 35), kemiskinan multidimensional melihat bahwa faktor yang menyebabkan orang menjadi miskin terdiri dari lingkup yang lebih luas tidak hanya dilihat dari perspektif pengeluaran konsumsi atau pendapatan perseorangan. Hal ini disebabkan karena Sumber penerangan masih menggunakan petromak, pelita atau lainnya, bahan bakar memasak masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah, atap rumah masih menggunakan seng yang tidak layak pakai, lantai rumah masih menggunakan papan yang kualitas

rendah serta dinding rumah masih menggunakan seng dan papan yang tidak layak.

kesejahteraan pada dimensi standar hidupnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan hasil analisis adalah kondisi yang dialami masyarakat Gorong-gorong seperti sumber penerangan masih menggunakan petromak, pelita atau lainnya, bahan bakar memasak masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah, atap rumah masih menggunakan seng yang tidak layak pakai, lantai rumah masih menggunakan papan yang kualitas rendah serta dinding rumah masih menggunakan seng dan papan yang tidak layak disebabkan karena masyarakat kurang untuk akses infrastruktur dasar serta kemiskinan yang dialami masyarakat Gorong-gorong mempunyai hubungan yang erat dengan dimensi psikologis seperti ketidak mampuan, ketidak berdayaan untuk menyuarakan, ketergantungan dan rasa malu.

Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial Kabupaten Mimika harus memberikan perhatian kepada masyarakat Gorong-gorong yang masuk dalam kategori indeks kemiskinan multidimensi tersebut berupa bantuan modal usaha, bedah rumah, ataupun lapangan pekerjaan untuk meningkatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Aidha, dkk. *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018*. Perkumpulan Prakarsa, 2020
- Anggraeny, Sinta. Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Lampung. 2016
- Azwar dan Achmat Subekan. Analisis Determinan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Volume 2, Nomor 1, Juni 2016. 2016: Hal. 1-25.
- Badan Pusat Statistik. BPS-Statistic Indonesia. *Statistik Indonesia. statistical Yearbook Of Indonesia*. 2019
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. *KabupatenMimika Dalam Angka*, 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. *Provinsi Papua Dalam Angka*. 2019.
- Baniadi, Pandu. Analisis Kemiskinan Multidimensi Di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. 2018.

- Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Penerbit Erlangga, 2016.
- Nuryitmawan, Tegar Rismanuar. Studi Komparasi Kemiskinan di Indonesia: *Multidimensional Poverty* dan *Monetary Poverty*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. Juni 2016; 01(1). 2016: Hal. 33-41.
- Robby, MZ Muhammad. Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pengrajin Batubata Di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. 2019
- Rosni. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*. Vol 9 No. 1 – 2017. 2017: Hal. 53-66.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta, 2011
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta. Penerbit Kencana, 2010.